

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Paket Pekerjaan	1.1	Kode RUP : 52969962
	1.2	Nama paket pekerjaan: Rehab Ruang RPK
	1.3	Uraian singkat paket pekerjaan: a. Rehab Ruang RPK
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Kontrak Lumsom</i>
B. Identitas Pejabat Pengadaan	1.6	Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN RPK
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kukar
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan : Jalan Pahlawan No. 1 Bukit Biru Tenggaraong
	1.9	Website Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah : -
	1.10	Website SPSE : https://lpse.kukarkab.go.id/
C. Sumber Pendanaan	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN RPK Tahun Anggaran 2024 2. <i>Pagu Anggaran: Rp.199.530.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)</i> 3. <i>Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 199.445.483,38,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah)</i>
D. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha	5	Persyaratan Kualifikasi: 1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi; 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan b. Klasifikasi : Bangunan Sipil c. Subklasifikasi : BG009 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung)

		3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak [Valid/Tidak Valid]. 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP); 7. Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.												
E. Masa Berlaku Penawaran	7.3.a.2) 10.2.a.3)	Masa berlaku surat penawaran : 7 (Tujuh) hari Kalender												
F. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	7.2.a.3) 10.2.a.4)	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender												
G. Persyaratan Teknis	10.3.e.1)	Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Peralatan Pertukangan</td><td>-</td><td>1 Unit</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> [diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan] Status Kepemilikan : (1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice); (2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Peralatan Pertukangan	-	1 Unit				
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah											
1	Peralatan Pertukangan	-	1 Unit											

		(3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.																
	10.3.e.2)	Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu <table><tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Pengalaman</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelaksana</td><td></td><td>Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan</td></tr><tr><td>2</td><td>Petugas K3 Konstruksi</td><td></td><td>SMK</td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> [diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan] Keterangan: Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat klarifikasi/negosiasi	No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Pelaksana		Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	2	Petugas K3 Konstruksi		SMK	dst			
No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja															
1	Pelaksana		Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan															
2	Petugas K3 Konstruksi		SMK															
dst																		